



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS MATARAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HAMSU KADRIYAN
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 442637

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 64.200.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 4.200 m2/1.000 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 172 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Tanah Seluas 10.600 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.000
5. Tanah Seluas 4.200 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000.000
6. Tanah Seluas 730 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000.000
7. Tanah Seluas 2.813 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 3.600.000.000
8. Tanah Seluas 1.283 m2 di KAB / KOTA LOMBOK UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
9. Tanah Seluas 4.000 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 3.800.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m2/100 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, WARISAN Rp. 450.000.000
11. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 695.000.000

1. MOBIL, HONDA SEDAN Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
170.000.000
2. MOBIL, HONDA MPV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
225.000.000
3. MOBIL, TOYOTA MPV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 175.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 2.908.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. 160.000.000

Sub Total

Rp. 68.138.000.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 68.138.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.